



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [setjen@kkp.go.id](mailto:setjen@kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 32/PPID-KKP/XII/2023

TENTANG  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.

KEDUA : Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains 'SEKRETARIAT JENDERAL'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO' is printed in black capital letters.

RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO

Salinan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Badan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan ini;
2. Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini;
3. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32/PPID-KKP/XII/2023  
TENTANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2024

No	Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Capaian Strategi	Rencana Aksi 2024	
					Program/Kegiatan	Output
1	Meningkatkan sistem tata kelola layanan informasi publik melalui pengembangan standar dan inovasi layanan	Pengelolaan Layanan Informasi Publik Secara Profesional	Menyusun regulasi dan kebijakan pendukung berupa Standar Layanan Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi, dll	tersedianya standar pelayanan informasi publik dan standar operasional prosedur layanan informasi publik	Penyusunan Standar Pelayanan Informasi dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi tahun 2024	Dokumen Standar Pelayanan dan SOP Layanan Informasi Publik
			Menetapkan pedoman dan prosedur untuk verifikasi dan validasi informasi sebelum disebarkan ke publik	Persentase informasi yang telah diverifikasi dan divalidasi sebelum disebarkan ke publik	Memperbarui dan meningkatkan fungsionalitas platform informasi kelautan.	Peluncuran versi baru platform informasi kelautan yang lebih interaktif dan mudah digunakan.
			Transparansi dan aksesibilitas	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang	Melakukan pelatihan internal untuk staf dalam pengelolaan	Peningkatan keterampilan staf dalam

				disediakan oleh kementerian	dan pemeliharaan platform.	pengelolaan platform.
				Jumlah kesalahan atau interpretasi yang diperbaiki setelah implementasi mekanisme verifikasi dan validasi	Melakukan pemantauan dan pelaporan data kelautan	Hasil dari pemantauan dan data kelautan
			Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan KKP tahun 2024	Terbitnya dokumen surat keputusan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan KKP Tahun 2024	Rapat koordinasi dan pemutakhiran DIP dan DIK dengan Eselon I di Lingkungan KKP	-
			Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara langsung di Ruang PPID di Lingkungan KKP	Tersedianya matrix permohonan informasi dan data kehadiran pemohon informasi di KKP	-	-
			Pelayanan Permohonan informasi secara online melalui aplikasi dan media sosial PPID KKP	Tersedianya matrix permohonan informasi secara online pemohon informasi di KKP	-	-
			Penyediaan Survey Kepuasan Masyarakat	Telah Survey Kepuasan	Melakukan survey kepuasan terhadap	Laporan Survey Kepuasan dengan

			bagi pemohon informasi di PPID KKP	Masyarakat bagi pemohon informasi publik dengan persentase baik	permohonan informasi publik yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan	kualifikasi minimal Baik
		Optimalisasi Feedback dan Pengaduan		Membangun mekanisme feedback yang mudah diakses oleh publik untuk menilai dan mengajukan pengaduan terkait layanan informasi publik.	Penyediaan Kotak Saran, Pengaduan dan Konsultasi di ruang pelayanan informasi	Matrix dokumen saran, pengaduan dan konsultasi
				Melakukan evaluasi berkala berdasarkan feedback yang diterima guna meningkatkan kualitas layanan.	Diskusi dan tindak lanjut atas feedback yang diterima oleh Tim Pelayanan Publik	Dokumen laporan tindak lanjut atas feedback yang diterima
			Koordinasi dan konsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik	Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik	Pengumpulan dan pengarsipan surat menyurat dokumen permohonan informasi publik	Surat menyurat dan dokumen permohonan informasi publik

			Penyediaan anggaran pelayanan informasi publik	Tersedianya anggaran pelayanan informasi publik	Penyediaan anggaran pelayanan informasi publik pada RKAKL	Tercantumnya anggaran Pelayanan Informasi Publik di RKAKL KKP
2	Meningkatkan kapasitas SDM layanan informasi publik melalui pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi dan pemberian insentif (reward dan punishment)	Pengembangan SDM Layanan Informasi Publik	Menyediakan anggaran dan dukungan untuk program pelatihan dan pengembangan pegawai dalam pengelolaan dan penyajian informasi kelautan dan perikanan	Persentase staf yang telah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan dan penyajian informasi kelautan	Melakukan program pelatihan intensif untuk staf tentang pengelolaan data kelautan.	Peningkatan keterampilan staf dalam pengolahan dan analisis data kelautan.
			Memberikan insentif bagi pegawai yang berpartisipasi dalam program pelatihan dan mencapai tingkat keterampilan yang ditetapkan	Jumlah peningkatan keterampilan dan pengetahuan staf setelah pelatihan	·Mengadakan workshop bersama dengan lembaga pendidikan untuk pertukaran pengetahuan.	.Pembentukan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan.
			Mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye kesadaran publik tentang isu-isu kelautan dan perikanan melalui kanal media	Jumlah retensi staf setelah pelatihan dan pengembangan	Sosialisasi dan meluncurkan kampanye multimedia tentang layanan informasi di masing-masing unit eselon I lingkup KKP	Serangkaian iklan di media Elektronik dan media online


			Peyediaan anggaran pengembangan SDM Layanan Informasi Publik	Tersedianya anggaran pengembangan SDM Layanan Informasi Publika	Penyediaan anggaran Pengembangan SDM Layanan Informasi Publik pada RKAKL	Tercantumnya anggaran pengembangan SDM Pelayanan Informasi Publik di RKAKL KKP
3	Menyediakan infrastruktur TIK dan fasilitas pendukung layanan yang memadai dan sesuai standar	Peningkatan Infrastruktur Layanan	Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan platform informasi	Jumlah pengguna aktif platform informasi kelautan dan perikanan (call center 141 dan webchat) (Jumlah)	Memperbarui dan meningkatkan fungsionalitas platform informasi kelautan.	Peluncuran versi baru platform informasi kelautan yang lebih interaktif dan mudah digunakan.
			Mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi kelautan dan perikanan yang berkualitas	Tingkat kepuasan pengguna terhadap interface atau layout pada layar desktop dan kegunaan platform (Persentase)	Melakukan pelatihan internal untuk staf dalam pengelolaan dan pemeliharaan platform.	Peningkatan keterampilan staf dalam pengelolaan platform.
			-	Tingkat partisipasi dalam pemantauan dan pelaporan data kelautan	Melakukan pemantauan dan pelaporan data kelautan	Hasil dari pemantauan dan data kelautan
			Pengembangan website dan aplikasi sistem layanan informasi	-	-	-
			Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana	Penyediaan sarana	Tersedianya

			Disabilitas	dan prasarana ramah disabilitas	dan prasarana ramah disabilitas	fasilitas tuna rungu, tuna wicara dan tuna netra
			Penyediaan anggaran Peningkatan Infrastruktur Layanan Informasi Publik	Tersedianya anggaran Peningkatan Infrastruktur Layanan Informasi Publik	Penyediaan anggaran Peningkatan Infrastruktur Layanan Informasi Publik pada RKAKL	Tercantumnya anggaran Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Informasi Publik di RKAKL KKP
		Pemantauan dan Evaluasi Layanan	Pengembangan Sistem Monev PPID KIP Terpadu (Internal)	Persentase implementasi sistem Monev terpadu berdasarkan jadwal yang ditetapkan	Melakukan Monev KIP PPID Internal terpadu	Persentase Tingkat kepatuhan Unit Kerja Pelaksana PPID
			-	Frekuensi pemantauan kinerja semester dan tahunan	Melakukan pendampingan terhadap PPID UPT	Peningkatan nilai "informatif" pada UPT PPID unit eselon I
			Evaluasi Dampak dan Efektivitas Pelaksanaan Arah Kebijakan	Evaluasi Dampak dan Efektivitas Pelaksanaan Arah dan Strategi Kebijakan Persentase peningkatan kinerja atau pencapaian target yang telah	Melakukan Monev KIP PPID Internal terpadu	Mendapatkan nilai "informatif" pada masing-masing unit eselon I

				ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi		
			Pembinaan PPID Pelaksana lingkup KKP	-	-	-
			Penyediaan anggaran Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik	Tersedianya anggaran Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik	Penyediaan anggaran Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada RKAKL	Tercantumnya anggaran Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik di RKAKL KKP
4	Membangun ekosistem layanan informasi publik yang berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Mendorong dan memfasilitasi kolaborasi antara KKP dengan stakeholder KKP, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan	Laporan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian lainnya	Mengadakan pertemuan dan forum diskusi dengan pemangku kepentingan.	Peningkatan kolaborasi antara kementerian dengan pemangku kepentingan industri dan non-pemerintah.
			Menyiapkan dukungan kemitraan pada pengembangan dan penyebaran informasi kelautan dan perikanan	Laporan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian lainnya	Menandatangani fakta integritas, perjanjian kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga pendidikan.	Kegiatan bersama untuk mendukung pengelolaan layanan informasi.
			-	Tingkat keberlanjutan dan pertumbuhan	-	-

				kemitraan dalam jangka panjang		
			Meningkatkan partisipasi publik melalui penyelenggaraan survei	-	-	-
			Penyediaan anggaran Kolaborasi dan Kemitraan Layanan Informasi Publik	Tersedianya anggaran Kolaborasi dan Kemitraan Layanan Informasi Publik	Penyediaan anggaran Kolaborasi dan Kemitraan Layanan Informasi Publik pada RKAKL	Tercantumnya anggaran Kolaborasi dan Kemitraan Layanan Informasi Publik di RKAKL KKP

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. In the center of the stamp, it says "SEKRETARIAT JENDERAL". A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Rudy Heriyanto Adi Nugroho